



## Rp 10 Miliar untuk Pembangunan BBI di Desa Baha

MANGUPURA, NusaBali

Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) di Desa Baha, Kecamatan Mengwi, yang di- gaungkan sejak tahun 2018 lalu, dalam waktu tidak lama lagi bakal terwujud. Sebab, Dinas Perikanan Kabupaten Badung sudah melakukan tender untuk pembangunan fisik. Nilai proyek kurang lebih sebesar Rp 10 miliar.

"Iya, sekarang sudah tender di LPSE untuk proyek pemban- gunan BBI di Desa Baha. Mu- dah-mudahan tahun ini proyek bisa selesai," ujar Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung I Putu Oka Swadiana, Rabu (20/3) kemarin.

Menurut Swadiana, pem- bangunan BBI ini adalah satu upaya untuk meningkatkan produksi benih ikan. Saat ini, rata-rata Badung menghasil- kan total 3.426.775 benih ikan. Jumlah tersebut, seban- yak 1.350.000 berasal dari

BBI, sedangkan 2.076.775 sisanya dari Unit Pembeni- han Rakyat (UPR). "BBI di Badung sebetulnya ada dua, yakni di Kelurahan Kapal dan Petang. Namun, karena BBI di Kapal bakal dijadikan kantor PDAM, maka sebagai gantinya BBI dibangun di Desa Baha," terangnya.

Untuk pembangunan fisik, Pemkab Badung menggelon- torkan anggaran kurang lebih Rp 10 miliar untuk pembangu- nan BBI di Desa Baha tersebut. "Jadi, nanti ikan yang akan dibudidayakan diantaranya Nila, Karper, Lele, dan Koi," terang birokrat asal Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara itu.

Lebih lanjut dikatakan, potensi perikanan air tawar sangat menjanjikan di Gumi Keris. Swadiana dalam be- berapa kesempatan menegaskan kebutuhan ikan air tawar saat ini masih sangat tinggi. Sementara, untuk memenuhi

kebutuhan ikan masih banyak ditopang dari luar Badung. "Semoga dengan adanya BBI di Baha, semakin meningkatkan jumlah produksi benih ikan di Badung," harapnya.

Nah, pada tahun 2019 ini, Pemkab Badung menargetkan produksi ikan air tawar mening- kat 5 persen dari tahun 2018 lalu. Adapun produksi ikan air tawar di Badung pada 2018 mencapai 728,10 ton, sedang- kan pada tahun 2017 mencapai 612,62 ton.

Disamping menyiapkan anggaran untuk pembangu- nan fisik, Dinas Perikanan juga menggelontorkan ang- garan senilai Rp 159 juta un- tuk penyediaan konsultan pengawas pembangunan BBI Baha. Saat ini pun tengah pula ditenderkan di LPSE. Hingga kemarin terhitung sudah ada 22 rekanan yang menyatakan berminat terhadap tender tersebut. **asa**

Edisi : Kamis, 21, Mar, 2019

Hal : 2



# Anggota Dewan dan Istri Saling Bersaksi

★ Kasus Korupsi Proyek Instalasi Biogas di Nusa Penida

Istri anggota dewan, Thiarta Ningsih yang merupakan Direktur CV Buana Karya mengaku tidak pernah mengikuti lelang proyek biogas karena tidak punya kualifikasi

DENPASAR, NusaBali

Anggota DPRD Klungkung, Gede Gita Gunawan, 42 dan istri Thiarta Ningsih, 35 yang menjadi terdakwa korupsi proyek Instalasi Biogas di Nusa Penida, Klungkung saling bersaksi di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (20/3). Selain itu pasutri ini juga bersaksi untuk terdakwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), I Made Catur Adnyana, 56.

Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila, istri anggota dewan, Thiarta Ningsih yang merupakan Direktur CV Buana

Karya mengaku tidak pernah mengikuti lelang proyek biogas karena tidak punya kualifikasi dalam proyek tersebut. Thiarta lalu minta suaminya menghubungi I Nyoman Suartika yang merupakan pemilik CV Sari Indah Karya yang memiliki kualifikasi biogas untuk ikut dalam lelang proyek. "Waktu itu saya minta suami saya menghubungi Pak Nyoman Suartika. Setelah itu saya yang bicara dengan Pak Nyoman untuk ikut lelang proyek biogas tersebut," jelas Thiarta.

Nah, setelah CV Indah Sari Karya ditetapkan sebagai pemenang, Thiarta meminta kepada Nyoman Suartika untuk mengerjakan proyek tersebut. Thiarta pun mengaku mengerjakan 40 proyek biogas di Nusa Penida. Majelis hakim lalu menanyakan mengapa perusahaan terdakwa yang tidak memiliki kualifikasi malah mengerjakan proyek tersebut.

"Kan perusahaan anda tidak punya kualifikasi biogas, kenapa mengambil proyek itu. Kan salah," jelas hakim Sukanila. Thiarta lalu mengatakan jika dirinya tidak menggunakan CV

Buana Karya namun hanya ikut kerja bersama CV Indah Sari Karya. "Saya diberi kepercayaan mengerjakan proyek itu oleh Pak Nyoman. Bukan CV saya yang mengerjakan tapi saya pribadi," beber Thiarta yang mengaku jika uang proyek tersebut masuk ke rekening CV Buana Karya miliknya.

Sementara itu, giliran anggota dewan Gede Gita Gunawan

yang diperiksa terkait proyek biogas ini.

Dalam pemeriksaan, Gita Gunawan hanya berperan menghubungi Nyoman Suartika sebagai pemilik CV Indah Sari Karya dan berbicara dengan istrinya lewat telepon. "Waktu itu saya ingat sore hari istri saya minta dihubungi Pak Nyoman. Setelah itu saya telepon pakai HP saya dan berikan ke istri. Setelah itu

saya tinggal," ujar Gita.

Setelah itu, ia mengaku tidak pernah lagi mengikuti proyek biogas yang dikerjakan istrinya. Termasuk menelpon terdakwa PPK, I Made Catur Adnyana. "Kan kamu berteman dengan terdakwa Catur. Masak kamu tidak ada menghubungi dia," tanya hakim.

Gita Gunawan lalu bersumpah tidak pernah menelpon terdakwa Catur terkait proyek tersebut. "Kalau boleh saya disumpah lagi supaya majelis hakim yakin kalau saya tidak pernah menghubungi terdakwa Catur," terangnya.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Klungkung ini mengaku sempat menelepon kepada dinas terkait proyek ini. "Waktu itu saya telepon kepala dinas supaya membimbing istri saya dalam proyek ini. Itu saja," jelasnya. Sementara terkait pembagian uang ataupun aliran uang, Gita Gunawan mengaku tidak tahu menahu. Setelah pemeriksaan saksi mahkota tersebut, sidang rencananya akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). **rez**

Edisi : Kamis, 21, Mar, 2019

Hal : 5



## Perbaikan Tanggul Munduk Bebengan Diperkirakan Capai Rp 2 Miliar

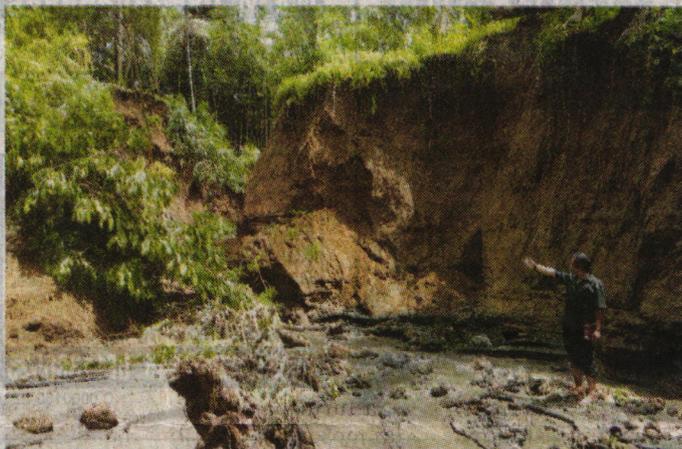
Bangli (Bali Post) -

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUTRPerkim) Kabupaten Bangli telah meninjau lokasi tanggul Munduk Bebengan di Banjar Tegalalang, Kelurahan Kawan yang jebol akibat hujan deras, Senin (18/3) lalu. Tindak lanjutnya, Dinas PUTRPerkim akan mengkaji ulang rencana perbaikan tanggul yang sebelumnya sempat diusulkan untuk dikerjakan tahun 2020.

Sekretaris Dinas PUTRPerkim Kabupaten Bangli Made Soma, Rabu (20/3) kemarin mengungkapkan, sejatinya telah merencanakan perbaikan tanggul tersebut pada tahun 2020 mendatang. Sesuai usulan sebelumnya, perbaikan tanggul dianggarkan Rp 900 juta dengan dana yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Namun, karena adanya bencana banjir yang menyebabkan tanggul jebol, maka pihaknya akan kembali mengkaji ulang untuk menentukan estimasi biaya perbaikan.

Menurut Soma, karena kerusakan tanggul saat ini cukup parah, maka pihaknya memperkirakan perbaikan akan menelan biaya antara Rp 1 hingga 2 miliar. Dalam upaya perbaikan nanti selain akan membangun kembali tanggul yang jebol tersebut dan akan membangun dinding penahan tanah. "Untuk menghindari kerawanan kebocoran, kita gunakan sistem beton," ungkapnya.

Terkait dengan dampak jebolnya tanggul yang mengancam hektaran lahan persawahan di hilir mengalami kekeringan, Soma mengaku akan



Bali Post/kmb40

**TANGGUL - Kondisi tanggul Munduk Bebengan di Banjar Tegalalang, Kelurahan Kawan yang jebol akibat hujan deras, Senin (18/3) lalu.**

melakukan koordinasi dengan pihak subak. "Kalau memang memungkinkan, upaya penanggulangan untuk sementara akan dilakukan secara manual terlebih dahulu," imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dampak hujan deras yang terjadi, Senin (18/3) lalu, telah mengakibatkan Tanggul Munduk Bebengan untuk saluran irigasi Subak Tampadeha, jebol. Jebolnya tanggul menyebabkan banjir bandang yang kemudian merusak sejumlah pepohonan dan jalan setapak yang menuju ke tegalan warga.

Kelian Subak Tegalalang Sang Ketut Rencana mengatakan, dampak dari jebolnya tanggul tersebut menyebabkan aliran air menuju Subak Tampadeha kini terpecah. Hektaran sawah yang berada di hilir, seperti di lingkungan Bebalang terancam mengalami kekeringan. Menurutnya untuk mengatasinya jalan satu-satunya

upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan menanggulnya kembali.

Kepala Lingkungan Tegalalang Sang Made Marjaya mengatakan, jebolnya tanggul tersebut terjadi sekitar sore hari. Terkait kejadian tersebut, pihaknya sudah melapor ke BPBD dan dinas terkait.

Sementara itu, selain menyebabkan tanggul jebol, tingginya intensitas hujan juga menimbulkan dampak kerusakan di sejumlah titik. Di SMPN 2 Bangli, puluhan meter tembok penyangker ambrol hingga mengenai bangunan kelas yang ada di dekatnya. Di subak Subak Aya utara di lingkungan Blungbang, Kelurahan Kawan, hektaran lahan sawah rusak. Di Dusun Tangkas, Desa Susut, dampak hujan deras menyebabkan dinding penahan tanah sepanjang 30x7 meter milik warga I Nengah Cerita amblas. (kmb40)

Edisi : Kamis, 21, Mar, 2019

Hal : 14



# Porprov di Tabanan Dianggarkan Rp 50 Miliar

## Tabanan (Bali Post) -

Pelaksanaan Porprov Bali XIV di Tabanan yang akan berlangsung September mendatang dianggarkan Rp 50 miliar. Rinciannya, kucuran dari Pemprov Bali Rp 25 miliar untuk renovasi GOR Debes, APBD Tabanan Rp 20 miliar guna persiapan kontingen dan bantuan KONI Bali Rp 5 miliar untuk pelaksanaan pertandingan seluruh cabang olahraga (cabor).

Itu dilontarkan Ketua Umum KONI Tabanan Dewa Gede Ary Wirawan di Tabanan, Selasa (19/3). Dijelaskannya, rehab tahap pertama GOR Debes menghabiskan Rp 15 miliar dan tahap berikutnya Rp 10 miliar. "Pembangunan GOR Debes baru dimulai April nanti dan diharapkan rampung pada Juli. Pembangunan GOR Debes baru akan berlanjut pada tahun berikutnya sampai selesai," ucapnya.

Sementara renovasi di Stadion Debes meliputi

lintasan atletik, tembok keliling, dan pemeliharaan rumput lapangan sepak bola. Untuk itu, tiga bulan sebelum pelaksanaan Porprov Bali, pihaknya akan menutup lapangan sepak bola untuk umum agar bisa fokus pada pemeliharaan dan penataan rumput stadion.

Ary Wirawan mengemukakan, arena pertandingan woodball di Selemadeg Timur perlu toilet, sedangkan lapangan rugby di Pupuan tinggal pemupukan dan pemeliharaan rumput yang dilakukan sesuai standar Porprov Bali. Sementara Lapangan Umum Kediri dipakai cabor panahan. "Kami juga memperhitungkan segi keamanan, jangan sampai anak panah meluncur terlalu jauh dan membahayakan," ungkapnya.

Pihaknya siap menerima usul dan saran dari delegasi teknis (*technical delegate*) cabor yang berkunjung ke Tabanan pada Kamis (21/3) ini. (022)

Edisi : Kamis, 21, Mar, 2019

Hal : 15



# Dewan Pertanyakan Serapan Dana Hibah

Semarapura (Bali Post) -

Lembaga dewan masih penasaran dengan realisasi dana hibah. Sebab, dalam rapat kerja eksekutif dan legislatif sebelumnya, eksekutif tak mampu menunjukkannya ketika ditanya sejumlah anggota dewan. Mereka kini mempertanyakan itu, untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi dana hibah.

Ketua Komisi II DPRD Klungkung Komang Suan-tara, Kamis (21/3) kemarin, mengatakan curiga bahwa ada yang tidak cakap di jajaran eksekutif dalam mengeksekusi dana hibah. Padahal, hibah ini menurutnya adalah program prioritas Bupati Klungkung Nyoman Suwirta. Sehingga muncul banyak masalah dan pengembalian dana terus-menerus. "Bila mana ada yang tidak cakap dalam kinerjanya mengeksekusi program pemerintah, apalagi itu soal hibah puluhan miliar yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, saya minta bupati harus bergerak. Segera evaluasi bawahan yang demikian," sorotnya.

Total hibah tahun 2018, khususnya dari Dinas Kebu-

dayaan Pemuda dan Olahraga Klungkung, bersumber dari dana APBD Induk 2018, sebanyak 466 proposal hibah senilai Rp 30,6 miliar. Jumlah itu realisasinya merata di seluruh kecamatan, antara lain Kecamatan Banjarangkan sebanyak 101 proposal senilai Rp 7,1 miliar, Kecamatan Dawan 133 proposal senilai Rp 7,9 miliar, Kecamatan Klungkung 188 proposal senilai Rp 8,5 miliar, dan Kecamatan Nusa Penida 114 proposal senilai Rp 7,2 miliar.

Sementara dalam APBD Perubahan ada 223 proposal senilai Rp 17,3 miliar. Ini juga merata di seluruh kecamatan, namun nilainya timpang antara kecamatan satu dengan lainnya. Kecamatan Banjarangkan 25

proposal senilai Rp 1,4 miliar. Kecamatan Dawan 33 proposal senilai Rp 2,2 miliar. Kecamatan Klungkung 60 proposal senilai Rp 3,9 miliar, dan Kecamatan Nusa Penida paling tinggi mencapai 105 proposal senilai Rp 9,9 miliar.

Saat ditanya soal realisasi, Sekda Klungkung Gede Putu Winastra waktu itu tidak memberikan tanggapan secara rinci. Berapa sudah realisasi hibah dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga itu. Berapa pula realisasi hibah dari OPD lain. Karena OPD lainnya juga ada mengelola dana hibah.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Pemerintah Daerah (BPPKPD) Nyoman Sumarta dimintai konfirmasi

soal angka serapan hibah belum lama ini mengatakan, data tersebut ada di setiap OPD, seperti hibah yang belakangan ini diributkan, itu ada di Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Klungkung. Demikian juga soal hibah dari OPD lain, progres serapan dananya tentu dikatakan ada di setiap OPD masing-masing.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Klungkung Nyoman Mudarta dihubungi terpisah menegaskan, data serapan anggaran hibahnya tentu ada di BPPKPD, bukan pada dinas yang dipimpinnya. Sebab, soal hibah ini, DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran)-nya ada di BPPKPD, masuk sebagai belanja tidak langsung. Jadi, kalau ditanya soal realisasi anggaran, tentu BPPKPD yang seharusnya paling tahu. "Kalau saya yang punya DPA-nya, saya pasti tahu berapa dana yang cair (terserap)," tegas Mudarta. (kmb31)

Edisi : Jumat, 22, Mar, 2019

Hal : 12



Pinjaman ke PT SMI Dibatalkan

## Pembangunan RS Nyitdah Gunakan BKK Provinsi



Bali Post/bit

**RS NYITDAH - Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dan Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya memberikan penjelasan mengenai kelanjutan pembangunan RS Nyitdah usai rapat paripurna, Jumat (22/3) kemarin.**

**Tabanan (Bali Post) -**

Pemkab Tabanan telah membatalkan rencana pinjaman senilai Rp 201 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk kelanjutan pembangunan RS Nyitdah. Pasalnya, anggaran untuk melanjutkan pemban-

gunan rumah sakit tipe C ini mendapat suntikan dana dari BKK Provinsi Bali sebesar Rp 20 miliar ditambah APBD Kabupaten Tabanan Rp 5 miliar. Ditargetkan pembangunan rampung tahun 2021.

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti didampingi

Wakil Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya usai rapat paripurna DPRD Tabanan, Jumat (22/3) kemarin, membenarkan telah melakukan pembatalan pinjaman tersebut. Namun, bukan berarti kelanjutan pembangunan RS Nyitdah berhenti. "Pembangunan sampai saat ini terus berjalan dan saran dari Gubernur Bali serta Ketua DPRD, mereka akan membantu tanpa harus berutang. Dari PT SMI sendiri juga tidak masalah terkait pembatalan itu. Justru mereka menyambut baik," ucapnya.

Di sisi lain, adanya aturan terkait dana mandatori 25 persen dari DAU, juga dirasa cukup berat jika nantinya harus membayar utang daerah tiap tahunnya. "Takutnya justru jadi beban APBD," terangnya.

Menurut Bupati Eka, sebenarnya pembangunan RS Nyitdah memerlukan dana Rp 400 miliar. Sampai saat ini pembangunan sudah menyerap anggaran Rp 80 miliar. "Bertahap dan rencananya tahun depan nilai BKK provinsi untuk melan-

jutkan pembangunan RS Nyitdah seperti dikatakan Pak Koster, lebih besar lagi nilainya," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Bapelitbang Tabanan Ida Bagus Wiratmaja menjelaskan, pembangunan RS Nyitdah tidak lagi *multiyears* seperti program pinjaman PT SMI. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap setiap tahun anggaran. Selain itu, tidak semua dana mandatori digunakan untuk pembangunan RS Nyitdah karena diarahkan juga untuk infrastruktur lainnya. "Pembangunan RS Nyitdah dilakukan bertahap menggunakan mandatori. Target selesai pada tahun 2021," jelasnya.

Untuk sementara, pihaknya berharap operasional RS Nyitdah dijalankan dulu dengan kondisi yang ada saat ini. Seperti diketahui, Pemkab Tabanan berupaya mengoperasikan RS Nyitdah yang telah dibangun sejak lama. Saat ini sudah ada dua gedung dan satu gedung dalam tahap penyelesaian. Untuk bisa menjadi RS tipe C, masih dibutuhkan empat gedung lagi. (kmb28)

Edisi : Sabtu, 23, Mar, 2019

Hal : 7



## Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2018 Pendapatan Daerah Tak Capai Target

**Tabanan (Bali Post) -**

Rapat paripurna dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan Tahun 2018 digelar Jumat (22/3) kemarin di gedung dewan. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Tabanan Ni Made Meilani. Dalam LKPJ yang disampaikan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, tergambar Pendapatan Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan tahun 2018 tidak memenuhi target.

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2018 hanya Rp 1,68 triliun lebih atau lebih rendah dari target sebesar Rp 1,77 triliun lebih. Sementara kebijakan belanja daerah diarahkan untuk membiayai sejumlah program unggulan seperti Gerbang Pariwisata, bedah rumah, bedah warung, Trans Serasi, sektot kesehatan, pendidikan dan masih banyak program lainnya.

Bupati Eka menyebutkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keselu-

ruhan diarahkan pada upaya pencapaian visi pembangunan yang telah disepakati bersama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 yakni terwujudnya masyarakat Tabanan yang sejahtera, aman, dan berprestasi (Tabanan Serasi). Tahun 2018 ini, tema pembangunan yaitu membangun teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing daerah menuju Tabanan Serasi.

Dalam tema tersebut terdapat frase kunci yaitu makna teknologi informasi yang merupakan satu sarana yang dapat memperkenalkan Tabanan secara luas dengan lebih efektif dan efisien. Kemudian, makna daya saing yang ingin dicapai Kabupaten Tabanan, yaitu dapat memiliki kemampuan yang setara bahkan lebih dibandingkan daerah lainnya dalam pemanfaatan potensi yang dimiliki, dan makna dari menuju Tabanan Serasi yaitu mewu-

judkan masyarakat Tabanan yang sejahtera, aman, dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.

Bupati Eka juga menyampaikan berbagai penghargaan yang diraih oleh Pemkab Tabanan selama tahun 2018, seperti *International Women's day*, penghargaan *Sindo Government Award* 2018, penghargaan Disdukcapil dalam perekaman dan pencetakan KTP elektronik tertinggi, penghargaan Kota Layak Anak dan beberapa penghargaan lainnya.

Dia mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, pimpinan dan anggota DPRD serta tokoh masyarakat terkait dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. "Semoga kerja sama dan sinergitas yang telah terjalin dengan baik dapat terus ditingkatkan guna membangun Kabupaten Tabanan yang kita cintai demi terwujudnya Tabanan yang Serasi," jelasnya. (kmb28)



## Warga Bangbang Pertanyakan Pemasangan Sambungan PDAM

Bangli (Bali Post) -

Warga Desa Bangbang mempertanyakan pemasangan sambungan air ke rumah-rumah yang tak kunjung dilakukan PDAM Bangli. Padahal warga sudah mengamprah dan membayar biaya hingga jutaan rupiah sejak tiga bulan lalu.

Salah seorang warga setempat, Ketut Kartika, mengungkapkan dirinya sudah melakukan pengamprahan sejak tiga bulan lalu. Bahkan sudah membayar biaya sebesar Rp 1,8 juta lebih ke PDAM. "Tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Tak kunjung ada pemasangan," ungkapnya, Minggu (24/3) kemarin.

Guna mendapatkan kejelasan terkait pemasangan sambungan baru itu, dia mengaku

sudah sempat menanyakan langsung ke pihak PDAM. Akan tetapi, sejumlah petugas yang ditemuinya di kantor PDAM tak bisa memberikan jawaban pasti terkait kapan sambungan baru pelanggan akan dipasang. Alasannya karena direktur PDAM sudah berhenti.

Sebagai calon pelanggan, Kartika mengaku kecewa dengan pelayanan PDAM Bangli yang menurutnya lambat dan

tidak jelas. Tak hanya dirinya, beberapa calon pelanggan baru PDAM di desanya juga mengeluhkan hal yang sama. Dikatakan Kartika, saat melakukan gebyar untuk menarik pelanggan baru di Desa Bangbang, pihak PDAM menjanjikan kepada warga akan melakukan pemasangan sambungan baru secepatnya. Hal itulah yang kemudian membuat banyak warga tertarik untuk mengamprah, sampai

terpaksa meminjam uang ke LPD. Karena air bersih sangat dinanti-nanti warga, dirinya berharap pihak PDAM secepatnya bisa memberikan kejelasan terkait pemasangan sambungan baru ini.

Perbekel Desa Bangbang Komang Sudianta dikonfirmasi terpisah juga mengungkapkan hal serupa. Dia menyebutkan ada sekitar 370 KK di desanya yang sudah mengamprah sambungan baru ke PDAM, termasuk dirinya. Untuk bisa mendapat layanan PDAM, dirinya dan calon pelanggan lainnya telah membayar biaya pemasangan pada Januari lalu sebesar Rp

1.830.000.

Dikatakan Sudianta, saat awal pengamprahan, pihak PDAM sempat menjanjikan akan melakukan pemasangan sambungan baru ke rumah-rumah warga pada bulan Februari, sebelum hari raya Nyepi. Akan tetapi, sampai sekarang tak kunjung ada pemasangan.

Pihak PDAM, diakuinya juga sempat turun bersama Kejaksaan Negeri Bangli untuk menyampaikan alasan lambatnya pemasangan sambungan baru ke rumah-rumah warga. Pada waktu itu diterangkan bahwa kendalanya ada pada proses tender dan

masalah teknis lainnya. "Tak lama setelah itu, pihak PDAM bersurat dan menyampaikan bahwa proses penenderan sudah dilaksanakan. Tapi sampai sekarang belum juga ada tindak lanjutnya di lapangan," ungkapnya.

Pihaknya sangat berharap pihak PDAM bisa memberikan kejelasan terkait realisasi pemasangan sambungan air ke pelanggan baru. "Harapan biar bisa segera dipasang," imbuhnya.

Sementara itu, Plt. Direktur PDAM Bangli Nyoman Terus Arsawan belum bisa dikonfirmasi terkait hal itu. (kmb40)

**"Tak lama setelah itu, pihak PDAM bersurat dan menyampaikan bahwa proses penenderan sudah dilaksanakan. Tapi sampai sekarang belum juga ada tindak lanjutnya di lapangan."**

Perbekel Desa Bangbang Komang Sudianta

Edisi : Senin, 25, Mar, 2019

Hal : 14



## 370 KK Warga Bangbang Menagih Janji PDAM

● Sudah Bayar Sejak 3 Bulan Namun Belum Terealisasi

**BANGLI, TRIBUN BALI** - Warga Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku mengeluh soal pemasangan sambungan baru jaringan PDAM ke masing-masing rumah. Sudah tiga bulan berlalu sejak pembayaran terakhir, pemasangan tersebut justru tidak jelas kabarnya.

Warga Desa Bangbang, Ketut Kartika mengatakan, pembayaran amprah untuk pendaftaran dan pemasangan telah dilakukan warga. Bahkan tak sedikit warga sampai meminjam uang di LPD hanya untuk menjadi pelanggan baru PDAM.

Selama ini, wilayah Desa Bangbang memang belum mendapatkan layanan PDAM. Di satu sisi, ada kabar PDAM berencana melakukan pengadaan sarana air minum baru di Desa Bangbang.

"Rencananya kami dijanjikan secepatnya untuk pemasangan saluran. Makanya masyarakat banyak yang sampai pinjam-pinjam uang ke LPD," ungkapnya Minggu (24/3).

Kartika mengaku telah berupaya meminta kejelasan akan persoalan itu dengan mengkonfirmasi ke kantor PDAM Bangli. Hanya saja, jawaban dari pegawai PDAM Bangli dinilainya tidak masuk akal. "Katanya direktur yang sebelumnya saat ini sudah berhenti, sudah selesai (habis masa jabatannya).

Terus apa urusannya uang masyarakat dengan direktur berhenti?," ungkapnya.

Setelah sempat berbincang dengan para pegawai PDAM, bilam ada pengangkatan direktur baru pihaknya berharap Bupati Bangli mempertimbangkan dengan matang sosok yang layak menjabat sebagai direktur. Terlebih PDAM merupakan perusahaan daerah agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih profesional.

Perbekel Bangbang, Komang Sudianta mengatakan, persoalan tersebut bermula dari gebyar PDAM untuk pengamprahan pelanggan baru. Warga yang berminat diharapkan agar segera melakukan pembayaran sesuai nominal yang telah ditentukan hingga akhir bulan Januari. Sebab awal Februari akan segera dilakukan proses tender. Namun nyatanya, proses tender terus tertunda.

Sudianta tidak memungkiri banyak masyarakat yang mengeluh pemasangan jaringan PDAM ke masing-masing rumah yang terus mundur. Sebab warga sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 1,8 juta lebih. Total warga yang ikut dalam pengamprahan pelanggan baru juga tidak sedikit. Berdasarkan data, jumlah warga yang mendaftar dan membayar mencapai 370 kepala keluarga.

Tidak jelasnya kelanjutan

proses tender hingga pemasangan sambungan ke masing-masing rumah ini, juga telah ditindaklanjuti pihaknya dengan berupaya menanyakan langsung pada PDAM Bangli. Namun tidak ada kepastian. Ia mengatakan PDAM telah berulang kali melayangkan surat permohonan maaf.

"Beberapa kali saya sudah menanyakan langsung pada PDAM. Kala itu disampaikan karena ada permasalahan teknis, di samping itu juga ada jangka waktu dalam proses pelelangan hingga pemenang tender. Saat itu didatangkan pula dari pihak kejaksaan yang menjelaskan bagaimana proses yang telah berjalan ini. Mungkin tujuannya untuk lebih meyakinkan saya. Ya saya sampaikan juga terkait keluhan beberapa warga yang menanyakan pada saya, karena ini prosesnya terlalu lama," bebernya.

PDAM telah memberikan kompensasi sementara berupa satu saluran air di setiap bale banjar dan pemukiman warga yang tergolong padat. Hanya saja, untuk air yang masuk ke masing-masing rumah warga belum ada. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM Bangli, Nyoman Terus Arsawan belum bisa dikonfirmasi mengenai persoalan yang terjadi di Desa Bangbang, Tembuku ini. (mer)

Edisi : Senin, 25, Mar, 2019

Hal : 5



Serahkan LKPD Sesuai Jadwal

## BPK Perwakilan Provinsi Bali Apresiasi Pemkab Tabanan

**BADAN** Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan karena menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hal itu diungkapkan langsung Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali Sri Haryoso Sulyanto didampingi jajarannya, Senin (25/3) kemarin, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Jalan Panjaitan No. 2 Denpasar.

Sri Haryoso Sulyanto sekaligus mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik dari Pemkab Tabanan. "Pada kesempatan ini kami berikan ucapan selamat pada Ibu Bupati

beserta jajarannya karena pertama kali LKPD diserahkan secara langsung oleh Kepala Daerah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik dalam rangka pelaksanaan fungsi pemeriksaan dan fungsi pertanggungjawaban dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan," ucap Sri Haryoso.

Setelah menerima LKPD yang langsung diserahkan oleh Bupati Tabanan, kata Sri Haryoso, BPK akan segera melaksanakan pemeriksaan. 60 hari setelah penyerahan laporan keuangan ini, maka BPK akan segera memberikan laporan hasil kerja pemeriksaan ini kepada Pemkab Tabanan.

Ia melanjutkan, pemeriksaan LKPD adalah un-

tuk memberikan opini atas tingkat kelancaran informasi laporan keuangan yang disajikan yang didasari kesesuaian dengan standar. BPK berharap atas penyerahan LKPD ini pemerintahan di Bali khususnya di Tabanan bisa mempertahankan opini yang telah diperoleh sebelumnya. "Tabanan sudah beberapa kali mendapatkan WTP. Tentu saja kami sangat berharap bahwa opini tersebut bisa dipertahankan untuk waktu-waktu yang akan datang," harap Sri Haryoso.

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti yang saat itu didampingi Sekretaris Daerah Tabanan I Gede Susila, Inspektur Tabanan I Gede Urip Gunawan dan Kepala Bakeuda Tabanan Dewa Ayu Sri Budiarti mengatakan, ke-

datangan dirinya dan jajaran ke BPK untuk memenuhi kewajiban menyerahkan LKPD yang telah disiapkan, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk BPK bisa melanjutkan tugas-tugasnya di Tabanan. Untuk tindak lanjut selanjutnya, harapan kami adalah untuk bisa selalu dibantu, dibimbing dan dibina, karena dalam laporan keuangan ini masih banyak hal-hal yang perlu disempurnakan," ujar Bupati Eka.

Di samping itu, Tabanan bisa memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan kembali lagi ke depannya bisa mendapatkan kepercayaan Opini WTP. "Tidak

hanya opini saja tetapi juga kepercayaan masyarakat Tabanan, di mana dalam pengelolaan keuangan ini kita berupaya memberikan yang terbaik, yang sesuai dengan aturannya, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan," kata Eka.

Bupati Eka menambahkan, untuk melancarkan pelaksanaan pemeriksaan tersebut, tentunya diperlukan pengawasan dan pengawalan yang serius dari pihaknya. "Hal tersebut tentunya harus selalu dikawal serta diawasi oleh pihak terkait agar bisa meminimalisir kesalahan baik itu sekecil apa pun. Dan juga agar tidak ada kesalahan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Bupati Eka. (ad775)



LKPD - Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menyerahkan LKPD ke BPK Perwakilan Provinsi Bali, Senin (25/3) kemarin.

Edisi : Selasa, 26, Mar, 2019

Hal : 7



LKPD - Bupati Badung Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyerahkan LKPD Onaudited tahun 2018 yang diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Senin (25/3) kemarin.

## Bupati Giri Prasta Serahkan LKPD Onaudited Tahun 2018

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Bupati Jembrana I Putu Artha dan Bupati Bangli I Made Gianyar menyerahkan LKPD Onaudited tahun 2018, Senin (25/3) kemarin. Pada kesempatan itu Bupati Giri Prasta didampingi Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dan Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa. Penyerahan diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto di Kantor BPK RI Perwakilan Bali.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta yang juga mewakili Kabupaten Bangli dan Jembrana mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Bali, termasuk perwakilan yang bertugas di kabupaten. Pasalnya, selama ini BPK sudah sangat bagus dalam berkoordinasi. "Kami tetap memohon pembinaan-pembinaan agar sesuai aspek regulasi," ungkapnya saat

memberi sambutan.

Di samping itu, Bupati Giri Prasta juga tetap meminta pendampingan dalam hal penagihan dan pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Dengan demikian, bisa memaksimalkan pendapatan daerah. "Apalagi saat ini Badung sudah membagi menyisihkan PHR ke kabupaten yakni Bangli, Jembrana, Tabanan, Klungkung dan Karangasem. Demikian pula menandatangani MoU G to G dengan Pemkot Denpasar dan Pemkab Gianyar," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Badung, Bangli, dan Jembrana. Penyerahan LKPD secara langsung oleh Kepala Daerah menurutnya pertama kali di Bali. "Oleh karena itu,

kami memberikan apresiasi Kepala Daerah sudah menyerahkan langsung LKPD ini," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, BPK akan segera melakukan pemeriksaan dan 60 hari setelah penyerahan, BPK akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya BPK akan memberikan opini terhadap LKPD, berdasarkan empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

"Kami mohon pada pemeriksaan nanti terbangun komunikasi yang harmonis antara pemeriksa dengan pengelola keuangan terhadap pelaksanaan anggaran di Kabupaten Badung, Bangli, dan Jembrana," harapnya. (ad769)

Edisi : Selasa, 26, Mar, 2019

Hal : 3



Pemkot Serahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018

## Kepala BPK RI Bali Harapkan Denpasar Pertahankan WTP

LAPORAN keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 diserahkan Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara kepada BPK RI Perwakilan Bali di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Renon, Denpasar, Senin (25/3) kemarin. Penyerahan laporan ini didampingi Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara, Kepala Inspektorat Denpasar I.B. Sidharta diterima Kepala BPK RI Perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto berharap Pemkot Denpasar dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih enam kali berturut-turut. Laporan keuangan Pemkot Denpasar yang diterima kali ini akan dilakukan pemeriksaan selama 30 hari. "Setelah penyerahan laporan ini, kami akan segera menyampaikan laporan pemeriksaan kepada DPRD dan Pemkot Denpasar," ujarnya.

Pemeriksaan laporan keuangan ini akan memberikan opini atas tingkat kewajaran dengan empat kriteria sesuai kepatuhan peraturan perundang-undangan. Pihaknya juga mengaku telah melakukan pemeriksaan pendahuluan pada Februari dan diakhiri Maret lalu. "Kami membuka ruang diskusi dan komunikasi bersama

sebagai bahan penyusunan laporan pemeriksaan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara didampingi Sekda Rai Iswara mengatakan, pihaknya telah menyerahkan laporan yang terdiri dari buku rancangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 hingga ikhtisar laporan dana desa. Dari laporan ini, Pemkot Denpasar secara berkelanjutan terus berkomitmen dalam menciptakan tata kelola keuangan dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2018 sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaya Negara juga mengapresiasi BPK yang telah melakukan evaluasi terkait dengan program-program yang telah dilaksanakan selama tahun 2018. "Tentu kami sebagai pelayan masyarakat telah berupaya maksimal dalam menjalankan setiap program demi kepentingan masyarakat, dan evaluasi dari BPK tentu menjadi acuan untuk segera kami tindaklanjuti," ujarnya sembari berharap masukan yang positif terhadap pembangunan di Kota Denpasar yang selalu mengedepankan keterbukaan informasi publik. (ad764)

Edisi : Selasa, 26, Mar, 2019

Hal : 2



# Bansos Dewan Diarahkan ke Pemberdayaan

Selama ini hibah bansos selalu diarahkan untuk kegiatan fisik. Namun dalam pelaksanaannya ditengarai lebih banyak diberikan dengan aroma politik.

SINGARAJA, NusaBali

Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana ingin hibah bantuan sosial (Bansos) yang difasilitasi oleh anggota DPRD, diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Langkah ini guna mempercepat pengentasan kemiskinan.

Selain di tingkat Kabupaten Buleleng, Bupati Agus Suradnyana juga mengusulkan hal yang sama untuk hibah bansos tingkat Provinsi Bali.

"Saya juga sudah sampaikan pada pak Gubernur, agar bansos yang difasilitasi oleh anggota Dewan itu jangan selalu untuk fisik. Biar ada untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat," ungkapnya usai membukan Musrenbang tingkat Kabupaten, dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2020, Senin (25/3) di Hotel Banyualit, kawasan Lovina.

Menurut Bupati Agus Suradnyana, selama ini hibah bansos selalu diarahkan untuk kegiatan fisik. Hanya saja, dalam pelaksanaannya lebih banyak diberikan pada Dadia karena ada kepentingan politik di dalamnya. Sehingga disebutkan ada satu desa yang justru

perbaiki fisik Pura Desa-nya tidak bisa dilaksanakan karena tidak mendapat hibah bansos.

"Ini kan tidak baik, Sanggah di Dadia-Dadianya cukup bagus, tetapi Pura Desa-nya justru rusak karena sangat sulit mendapatkan hibah bansos. Karena ape, karena Dadia-Dadia itulah yang memberikan hak suara, apalagi dalam event politik saat ini," ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Bupati Agus Suradnyana sedang memikirkan realisasi hibah bansos itu harus diprosentase, untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga selain bisa memperbaiki fisik, hibah bansos itu juga mampu mengentaskan kemiskinan.

Langkah ini pun akan dibicarakan lebih lanjut dengan lembaga DPRD Buleleng. "Kalau untuk pemberdayaan

masyarakat, ya diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat seperti petani, nelayan adan kelompok usaha lainnya, sehingga mereka ini mampu meningkatkan daya saing. Sehingga ini akan menjawab pengentasan kemiskinan itu," terangnya.

Sebelumnya Gubernur Bali, I Wayan Koster saat membuka acara Festival Buah Manggis di Desa Galungan, Kecamatan Sawan, Buleleng, pada Sabtu (23/3) juga sempat menyinggung pemanfaatan hibah bansos Pemprov Bali. Ia pun sepakat jika hibah bansos yang difasilitasi oleh anggota Dewan Provinsi, dapat diarahkan untuk pemberdayaan. "Tentu ini harus disiapkan aturannya dulu, Tahun ini tidak bisa, mungkin nanti di tahun 2020 sudah bisa diterapkan hal itu," katanya. **k19**

Edisi : Selasa, 26, Mar, 2019

Hal : 4



## Tak Bayar Sub Kontraktor Akibat Pemenang Tender

# Pekerja Bongkar Gedung Sentra IKM Celuk

Ada juga sub kontraktor bermodal uang pinjaman. Namun jatuh sakit karena memikirkan kapan dapat bayaran.

GIANYAR, NusaBali

Proyek Pemkab Gianyar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Gianyar berupa pengadaan bangunan fisik sentra IKM di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati dibongkar paksa oleh pekerja sub kontraktor, Senin (25/3) siang. Pembongkaran diawali dengan penurunan belasan ribu genteng. Pembongkaran lantaran pihak pelaksana proyek dengan nomor kontrak 511.2/2268/DISPERINDAG yakni PT Marabuntha Ciptalaksana (MC) ini lepas tanggungjawab.

PT MC tidak membayar sub-sub kontraktor yang telah merampungkan bangunan fisik dengan nilai pekerjaan dan material Rp 4.173.966.000. Sub kontraktor pun menuntut kejelasan pihak Disperindag selaku leading sector terkait pembayaran proyek yang di-

danai dari APBD Gianyar Tahu 2018 ini. Para pekerja mengaku kerugian dari pengerjaan proyek ini mencapai Rp. 3 miliar lebih.

Salah satu sub-kontraktor, Supriadi mengatakan aksi nekat membongkar bangunan ini lantaran Disperindag tidak ada tanggapan terkait pembayaran kepada pekerja sub kontraktor. "Pembongkaran ini kami lakukan karena tekanan dari pekerja yang minta ongkos kerja mereka. Sementara kami sebagai sub kontraktor belum dibayar oleh PT MC," ungkapnya, kemarin.

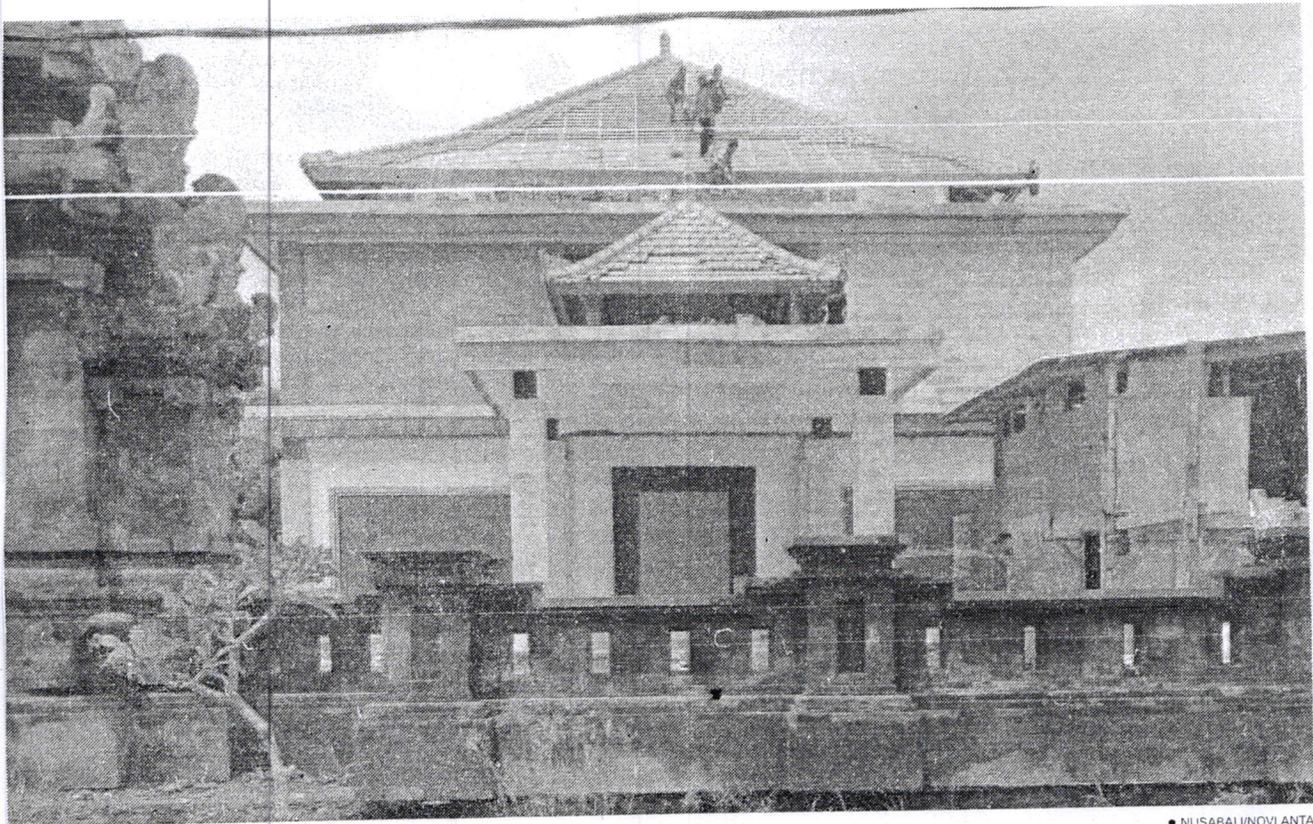
Supriadi menjelaskan, proyek yang mulai dikerjakan pada 19 Juli 2018 ini seharusnya rampung setelah 140 hari atau bulan Desember 2018. Namun ketika proyek berjalan sekitar 77 persen, para pekerja sudah mulai khawatir PT MC tidak melakukan pembayaran. Maka itu, proyek sempat mangkrak sebulan. Ketika itu Kepala Disperindag Gianyar I Wayan Suamba minta agar proyek dirampungkan. Meski was-was, ia coba melanjutkan pekerjaan sesuai target. "Dengan jaminan Pak Suamba sendiri yang mengatakan anggaran proyek ini masih ada di dinas dan aman. Maka kami yakin, ternyata setelah rampung kekhawatiran kami terbukti. Dari Pak

Edisi : Sabtu / 25 Maret 2019

Hal : 6



Lanjutan Hal 6



● NUSABALINOVI ANTA

Sejumlah pekerja membongkar genteng bangunan sentra IKM di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Senin (25/3).

Suamba sendiri juga tidak ada respon," ungkapnya.

Supriadi mengaku, upaya komunikasi dan koordinasi

baik dengan Disperindag maupun PT MC telah dilakukan. Namun pekerja hanya mendapatkan janji-janji manis yang tidak

pernah terbukti. Dikatakan Supriadi, para pekerja akan terus melakukan pembongkaran hingga ada kejelasan dari Dis-

perindag. "Kami kurang tahu ada permainan apa di proyek ini," ujarnya geleng-geleng. Ia pun bertanya-tanya, men-

genai kontrak kerjasama dengan PT MC ini. "Di proyek sebelumnya, kami pernah ditipu sekitar Rp 200 juta oleh PT MC. Dikasi BG (biro gilyet), tapi ternyata kosong," ujarnya. Hal senada juga disampaikan pemborong kap baja, Komang Budi Saputra. "Dari awal saya sudah khawatir proyek ini ndak beres," jelasnya. Saputra sendiri memborong pemasangan kap Baja senilai Rp 350 juta. Dari jumlah itu, ia baru mendapatkan ongkos 10 persen. "Saya berani ambil karena pekerjaan ini karena ada rekomendasi dari Kepala Disperindag. Tapi setelah selesai pasang kap, tidak sesuai perjanjian kontrak. Mereka ngejar waktu, tapi ketika saya minta uang, gak dikasi," ujarnya.

Pihaknya mengaku, sudah pernah ramai-ramai datang ke Kantor Disperindag Gianyar dan menghadap Bupati Gianyar. Tapi tidak juga ada respon. "Ada juga sub kontraktor bermodal uang pinjaman. Namun jatuh sakit karena memikirkan kapan dapat bayaran," ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Disperindag I Wayan Suamba belum memberikan tanggapan soal masalah itu. Ia pun enggan berkomentar dan mengaku masih sedang ada di Jakarta bertemu Wakil Presiden. "Saya masih ada rapat sama Wapres," ujarnya singkat. **☎ nvi**

Edisi : Selasa 16 Maret 2011

Hal : 6



# RADAR BALI

## Bupati Giri Prasta Bagi Hibah Rp 3 M di Desa Adat Poh Gading

**DENPASAR** - Dalam mewujudkan *Badung Angelus Buana* atau Badung Berbagi dari Badung untuk Bali, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan hibah Rp 3 miliar ke Desa Adat Poh Gading, Ubung Kaja, Denpasar. Berlangsung di wantilan Desa Ubung Kaja, Denpasar, Minggu (24/3).

Kata Bupati, ini merupakan wujud nyata program *Badung Angelus Buana*. Artinya, dari Badung untuk Bali. "Konsep warisan yang didapat sejak dari lahir adalah aspek yuridis, aspek filosofis, aspek so-



**BADUNG ANGELUS BUANA:** Bupati Giri Prasta (tengah) serahkan hibah Rp 3 miliar di wantilan Desa Ubung Kaja Denpasar, Minggu (24/3).

siologis Kita adalah *pasemetonan, nyama braya, semeton Bali*," kata Bupati. Ditegaskan, kehadirannya

di tengah masyarakat, murni demi meringankan beban *krama*. Salah satu contohnya, untuk membangun pura, bale banjar, wantilan. Termasuk, membantu *sekaa teruna*. "Kami harap, program ini dapat meringankan beban masyarakat. Dan ke depan, kami tidak berhenti sampai di sini. Sepanjang aspek regulasi memungkinkan, hal ini dan kemampuan keuangan daerah yang ada di Kabupaten Badung, kami akan terus lakukan ini sampai akhir dari masa jabatan kami sebagai Bupati Kabupaten Badung,"

tegas Giri Prasta.

Bendesa Adat Poh Gading AA Ngurah Ketut Suparta berterima kasih kepada Bupati Badung. Hibah itu untuk Banjar Tag Tag Tengah Rp 1 miliar, Pura Pasek Ubung Rp 200 juta,

Pura Dalem Penataran Rp 100 juta, Pura Dalem Singasari Rp 1,5 miliar, Pura Taman Magendra Rp 100 juta.

Kehadiran Bupati Badung didampingi Kabag Humas Pemkab Badung Putu Ngurah

Thomas Yuniarta, disambut bendesa adat Poh Gading, prajuru Pura Dalem Singasari, warga Tag Tag Tengah, warga Kelurahan Ubung, dan tokoh masyarakat setempat. (adver-torial/dwi/djo)

Edisi : Selasa, 26, Mar, 2019  
Hal : 8



# RADAR BALI



IST

**SERAHKAN LAPORAN:** Bupati Jembrana I Putu Artha serahkan LKPD kepada kepala BPK RI perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto.

## Pemkab Jembrana Serahkan LKPD

**DENPASAR** -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018, Senin (25/3). Penyerahan itu langsung dilakukan Bupati Jembrana I Putu Artha diterima Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar.

Hadir juga dalam penyerahan itu, Sekda Jembrana Made Sudiada, Inspektur Jembrana Wayan Koriani, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah I Dewa Gde Kusuma Antara, Kabag Humas dan Protokol Made Cipta Wahyudi. Selain Jembrana, ada dua Kabupaten lain yang menyerahkan LKPD nya yakni Kabupaten Badung oleh Bupati Nyoman Giri Prasta dan Wakilnya serta Kabupaten Bangli oleh Bupati I Made Gianyar.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali Sri Haryoso Suliyanto mengatakan penyerahan LKPD kepada BPK merupakan implementasi dari Undang Undang no 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan undang - undang keuangan lainnya. "Kami mengucapkan terima kasih kepada semua kabupaten yang sudah berkenan menyerahkan LKPD Unaudited," ungkapnya. Menurut Sri Haryoso, ini adalah pertama kalinya LKPD di serahkan langsung oleh kepala daerah. Setelah di terima BPK, maka akan dilaksanakan tindak lanjut selama kurang lebih 60 hari dan hasil yang di keluarkan berupa LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan) dalam bentuk opini.

Sementara itu Bupati Artha menyampaikan terima kasihnya kepada BPK RI atas pembinaan yang diberikan oleh BPK kepada Pemkab Jembrana. "Dan kami di Pemkab Jembrana sangat siap untuk menjalani pemeriksaan BPK untuk terwujudnya pelaporan keuangan yang baik. Kami memohon agar BPK RI tetap melakukan pembinaan dan komunikasi serta sinergi yang selama ini berjalan dengan baik, tetap bisa terjalin selamanya," ujarnya. (adv/nom)

Edisi : Selasa, 26, Mar, 2019

Hal : 6



## Bupati Giri Prasta Serahkan LKPD Onaudited Tahun 2018

**BUPATI** Badung, I Nyoman Giri Prasta bersama Bupati Jembrana, I Putu Artha dan Bupati Bangli, I Made Giyanyar menyerahkan LKPD Onaudited tahun 2018, Senin (25/3). Pada kesempatan itu, Bupati Giri Prasta didampingi Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa dan Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa. Penyerahan diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto di Kantor BPK RI Perwakilan Bali.

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta yang juga mewakili Kabupaten Bangli dan Jembrana mengucapkan terima kasih kepada BPK RI perwakilan Bali, termasuk perwakilan yang bertugas di Kabupaten. Pasalnya selama ini, BPK sudah sangat bagus dalam melakukan koordinasi

"Kami tetap memohon pembinaan-pembinaan agar sesuai aspek regulasi," ungkapnya saat memberi sam-



**BUPATI** Badung Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa menyerahkan LKPD Onaudited tahun 2018 yang diterima langsung Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto di Kantor BPK RI Perwakilan Bali, Senin (25/3).

butan.

Di samping itu, Bupati Giri Prasta juga tetap meminta pendampingan dalam hal penagihan dan pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Dengan demikian, bisa memaksimalkan pendapatan daerah.

"Apalagi saat ini Badung sudah membagi menyisihkan PHR ke enam Kabupaten, yakni Bangli, Jembrana, Tabanan, Klungkung,

dan Karangasem. Demikian pula menandatangani MoU G to G dengan Pemkot Denpasar dan Pemkab Gianyar," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Bali, Sri Haryoso Suliyanto juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab, Badung, Bangli, dan Jembrana. Penyerahan LKPD secara langsung oleh Kepala Daerah menurutnya pertama kali

di Bali.

"Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi Kepala Daerah sudah menyerahkan langsung LKPD ini," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, BPK akan segera melakukan pemeriksaan dan 60 hari setelah penyerahan, BPK akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya BPK akan memberikan opini terhadap LKPD, berdasar empat kriteria. Pertama kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

"Kami mohon pada pemeriksaan nanti terbangun komunikasi yang harmonis antara pemeriksa dengan pengelola keuangan terhadap pelaksanaan anggaran di Kabupaten Badung, Bangli, dan Jembrana," harapnya. (adv/gus)

Edisi : Selasa, 26, Mar, 2019

Hal : 6